

MENGGUGAT DAN MEREKONSTRUKSI PARADIGMA PEMBANGUNAN EKONOMI NASIONAL : KETERBELAKANGAN TEKNOLOGI DAN KEMUNDURAN KEWIRAUSAHAAN DI INDONESIA

Didin S. Damanhuri*

Aliansi Kebangsaan dan L-KEN (Lingkar Kajian Ekonomi Nusantara)
e-mail: didinsd@yahoo.com

Abstrak

Penelitian tentang *Keterbelakangan Teknologi dan Pembangunan Ekonomi di Indonesia* berlangsung Maret - September 2013 di Jakarta. Penelitian ini diawali dari ekonomi berbasis konstitusi (*constitutional-based economy*), yakni, pendekatan ekonomi yang berdasarkan UUD 45. Pendekatan ini dibandingkan dengan teori-teori ekonomi "arus tengah" (Neoklasik) yang menempatkan Negara dalam prinsip "*minimum state*" serta IPTEK (ilmu pengetahuan dan teknologi) sebagai faktor *eksogen*. Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Metode yang digunakan bersifat kualitatif, sedangkan kuantitatif yakni *total factor productivity* (TFP). Kesimpulan penelitian ini adalah salah satu instrumen dalam mencapai kesejahteraan agar tidak berada dalam keterbelakangan yakni menguasai teknologi sehingga tidak membeli atau mengimpornya. Problem model pembangunan di Indonesia, sejak tahun 1970-an hingga sekarang lebih mengutamakan investasi langsung perusahaan multinasional disertai dukungan utang bilateral maupun multilateral. Penelitian ini juga menyimpulkan hilangnya perspektif konstitusi dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Agar proses pembangunan Indonesia mewujudkan kedaulatan membutuhkan prasyarat; (i) peran Negara yang proaktif dan kredibel dan, (ii) mekanisme pasar yang sehat dan pelaku ekonomi (swasta, BUMN dan Koperasi) yang efisien serta efektif. Pendekatan ekonomi konstitusi ini akan semakin kuat apabila mengembangkannya dalam konteks ekonomi lokal yang mengandung lapisan wirausahaan daerah beserta kecerdasan dan kearifan lokalnya. Hal ini akan berkontribusi dalam bentuk politik kemandirian teknologi dan kewirausahaan di tingkat nasional. Dengan demikian dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, berkelanjutan serta pembangunan yang berkeadilan sosial demi mewujudkan kemandirian bangsa.

Kata kunci: Ekonomi Berbasis Konstitusi, Minimum State

Criticizing and Reconstructing the Paradigm of National Economic Development: Technology Illiterate and Entrepreneurship Deterioration In Indonesia

Abstract

The study of technology illiteracy and national economic development is conducted from March until September 2013 in Jakarta and it begins from constitutional-based economy paradigm which refers to UUD '45 rather than mid-stream economic (Neoclassical). This approach is compared with the economic theories "mid-stream" (Neoclassical) which puts the nation in the principle of "minimum state" as well as science and technology as an exogenous factor. This study constructed by using primary and secondary data. Furthermore, it employs the TFP (Total Factor Productivity) and FGD (Focus Group Discussion) method. The conclusion of this study is that the instruments to achieve well-being and not being under develop are to take control the technology, not buy or import it. The problem of the national economic development, since 1970 until now, are generally because it emphasized more to direct investment of multinational companies with debt support, both bilaterally and multilaterally. Also, in this study concluded the deterioration of constitution paradigm in the economic

* Ketua Tim Riset; Anggota Tim Riset terdiri dari: Ahmad Zacky Siradj, M. Firdaus, Saafroedin Bahar, Fachzenil Jannis, Audillah Azizy, Eko Listiyanto, dan Setia P. Lenggono

development. The constitution could embody the achievement of sovereignty by (i) being proactive and credible country, (ii) have a healthy market mechanism and an efficient and effective economic player (private, state and cooperative). The Constitution-based economic approach even more strongly with the development of the local economy in which there is a layer of intelligence and its local entrepreneurship and local wisdom, and subsequently contributed by the presence of political independence and entrepreneurial technology at national level. Based on this paradigm, the objectives are to create a quality and sustainable growth, and development with social justice, which in turn, creating the society resilience.

Keywords: constitution-based-economic, technology independence/resilience

Untuk mengatasi berbagai permasalahan dalam pembangunan ekonomi, para ekonom, pejabat, pengamat maupun masyarakat umum berangkat dari pendekatan yang berbasis pemikiran neo-klasik (*mainstream economy*). Riset tentang *Keterbelakangan Teknologi dan Pembangunan Ekonomi di Indonesia* yang dilakukan mulai bulan Maret - September 2013 di Jakarta, bukan menggunakan pendekatan tersebut di atas tetapi berangkat dari Ekonomi berbasis Konstitusi (*constitutional-based economy*). Pendekatan berbasis konstitusi yaitu suatu pendekatan Ekonomi yang mengacu kepada UUD 45, baik yang terkandung dalam pembukaannya maupun dalam pasal-pasal (pasal 27, 33, 34). Jika disarikan, maka pendekatan tersebut merupakan sebuah pendekatan ekonomi yang mendudukan peran Negara yang Proaktif bersamaan dengan peran Swasta, BUMN dan Koperasi dalam mekanisme pasar yang sehat untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Wacana ekonomi yang berkembang sampai saat ini di Indonesia, lebih didominasi isu-isu ekonomi berbasis pemikiran neo-klasik seperti pertumbuhan ekonomi atau PDB (produk domestik bruto), nilai tukar Rupiah, IHSG (Index Harga Saham Gabungan), krisis moneter dan fiskal. Padahal, dalam beberapa tahun terakhir ini, kritik terhadap paradigma Pertumbuhan sebagai keberhasilan pembangunan ekonomi sebenarnya sangat keras. Salah satunya adalah hasil laporan kerja yang terdiri dari Joseph E. Stiglitz, Amartya Sen dan Jean-Paul Fitoussi (Stiglitz, *dkk.*, 2011). Dalam prakata laporan itu, Stiglitz sangat prihatin tentang bagaimana penilaian terhadap dampak PDB yang bisa menimbulkan keputusan-keputusan keliru terkait pembangunan SDA (sumber daya alam).

Mantan Ekonom Kepala Bank Dunia ini mengungkapkan bahwa banyak negara berkembang sedang didesak agar memprivatisasi ekstraksi SDA, walaupun sebagian besar labanya lari ke luar negeri. PDB akan meningkat sejalan

dengan aktivitas pertambangan. Namun, nyatanya, bahwa laba diperoleh pihak-pihak dari luar negeri, dan PNB (produk nasional bruto) ada kemungkinan tak bertambah. Jika diperhatikan secara lebih jauh lagi akan berdampak terhadap semakin terkurasnya SDA dan yang mengakibatkan efek negatif pada kesehatan dan lingkungan hidup. Akibatnya warga negara di negeri ini kehidupannya semakin memburuk.

Isu lainnya, adalah kontroversi solusi pemerintah saat ini terhadap melemahnya kurs Rupiah terhadap Dolar AS (Amerika Serikat). Kecenderungan solusi pemerintah terhadap melemahnya atau jatuhnya nilai Rupiah terhadap Dolar AS adalah dengan paket kebijakan pemerintah berupa insentif yang hanya menyentuh kalangan pengusaha. Masalah lain adalah membengkaknya subsidi energi, khususnya migas. Pemerintah memberikan solusi menaikkan harga BBM 30%. Padahal, masalahnya lebih bersifat struktural, contohnya pemerintah tidak membangun pabrik pengkilangan minyak di dalam negeri. Akibatnya, dengan hanya melakukan pendekatan moneter melalui kenaikan harga BBM, akan terus menimbulkan masalah yang menyerupai spiral antara kenaikan subsidi dan harga BBM. Dampak selanjutnya yaitu menambah keterpurukan kelompok penduduk yang pengeluarannya 2 US\$/hari (kategori miskin menurut Bank Dunia) yang jumlahnya diperkirakan mencapai 50% penduduk Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-analitis. Dengan metode ini diharapkan dapat menggambarkan dan menganalisis penguasaan teknologi serta pengembangan kewirausahaan di Indonesia selama ini, dari masa ke masa —sebelum kemerdekaan hingga pasca-kemerdekaan. Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder. Data primer dalam

penelitian ini diperoleh dari narasumber yang terlibat dalam *Focus Group Discussion (FGD)* dan Seminar yang memiliki kompetensi sesuai dengan topik ini. Sementara, data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari studi pustaka dan pengumpulan data-data sekunder yang relevan baik melalui jurnal maupun laporan ilmiah. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dan kuantitatif (campuran) dengan menggunakan penghitungan *TFP (total factor productivity)*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ekonomi Berbasis Konstitusi Dari Masa Ke Masa

Berbeda dengan latar belakang di atas, studi ini menjelaskan pentingnya peranan pemikiran ekonomi Berbasis Konstitusi dibandingkan dengan neo-klasik. Hal ini penting, jika menyadari urgensi penguasaan dan kedaulatan teknologi serta kebangkitan kewirausahaan di Indonesia. Hasil penelitian ini menemukan bahwa penguasaan teknologi di Indonesia relatif lebih baik sebelum masa penjajahan dibandingkan pasca-kemerdekaan. Fakta ini dapat dilihat dalam periode pemerintahan era Demokrasi Parlementer (Masa 1950-1959), era Demokrasi Terpimpin (Masa 1959-1965), Era Orde Baru (1966-1998) dan Era reformasi (1998-sekarang).

Hal pokok yang perlu diketahui seluruh masyarakat Indonesia bahwa bangsa ini memiliki konstitusi-UUD 1945. Dalam UUD 1945 mengandung upaya untuk mendorong terciptanya kemandirian dan kedaulatan di satu pihak dan menguasai Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek) di pihak lain. Terkait kemandirian dan kedaulatan UUD 1945 telah memuat dan mengamanatkannya dalam pasal 33 yang menekankan peran negara harus: (1) “menyusun perekonomian” sebagai usaha bersama atas azas kekeluargaan dan gotong-royong; (2) menguasai cabang-cabang produksi penting yang menguasai hajat hidup orang banyak; dan (3) menguasai bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ditambahkan juga dalam pasal 34 yang menyatakan bahwa: Negara harus membangun Sistem Jaminan Sosial dan pasal 27: Negara harus menyediakan kesempatan kerja yang layak dan bermartabat. Berdasarkan aturan konstitusi tersebut, hanya Negara aktiflah yang mampu menciptakan bangsanya berdaulat, mandiri dan menguasai IPTEK. Konstitusi UUD 1945 telah

menjamin terciptanya hal ini dalam proses pembangunan pada pasal 33, 34 dan 27 (Swasono, 2005). Selanjutnya, Swasono (2005) menyatakan bahwa Sistem Ekonomi “pasar bebas” (baca: Neoliberalisme) akan lebih menciptakan “aboriginisasi” perekonomian bangsa model *Culturstelsel* yang dalam bahasa penulis akan mendorong Neokolonialisme ekonomi di alam globalisasi.

Sementara teori-teori ekonomi “arus tengah” (baca: neoklasik), menempatkan Negara lebih berprinsip “*minimum state*” serta IPTEK sebagai faktor eksogen. Hal ini berarti negara tak boleh melakukan campur tangan dalam perekonomian dan membatasi diri pada fungsi regulator. Kondisi ini memposisikan perkembangan IPTEK sebagai faktor eksogen/luar yang tidak perlu menjadi target yang harus dikuasai. Kalau perlu membelinya di pasar internasional jika biayanya lebih murah (Mubyarto, 2001) (Gambar 1). Para teknokrat ekonomi sangat kencang mewacanakan pemikiran ini. Prof. BJ Habibie membangun Industri-industri strategis yang banyak mendapatkan subsidi APBN Pemerintahan Orde Baru dan pasca krisis moneter 1998. Ketika IMF masuk dalam skema pemulihan ekonomi Indonesia pasca 1998, hampir seluruh pengembangan teknologi dalam industri strategis tersebut mengalami kemunduran signifikan. Hal ini disebabkan adanya rekomendasi IMF untuk mencabut subsidiya. Belakangan, kalangan ekonom yang dianggap penganut neolib berusaha mengamandemen UUD 1945 secara total khususnya pasal 23, 27, 33 dan 34 sekaligus menghilangkan penjelasan-penjelasan dalam sidang Tim Ahli MPR RI Maret-April 2001. Kalangan ekonom neolib ini akan menggantinya dengan prinsip ekonomi *mainstream*-kapitalisme, yang intinya berprinsip “Negara Minimum”, prinsip efisiensi dan daya saing, serta menuduh bahwa UUD 45 lebih etatistik dan sosialistik. Para ekonom yang menganut prinsip Negara minimum yaitu Syahrir, Sri-Mulyani, dan Sri-Adiningsih. Sementara, kalangan ekonom yang mempertahankan pasal 23, 27, 33 dan 34 UUD 1945 yaitu Mubyarto, Sri-Edi Swasono dan Mohammad Dawam Rahardjo. Mubyarto (2001) menjelaskan bahwa pasal-pasal tersebut juga mengandung prinsip efisiensi dan daya saing, tetapi lebih menjamin pencapaian keadilan ekonomi, keadilan sosial dan perkembangan IPTEK untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Negara-Negara berkembang (NSB), termasuk Indonesia, akibat semakin tergantung

kebijakan pembangunannya dalam alam globalisasi malah semakin gagal membangun ekonominya. Kasus semacam ini banyak terjadi negara-negara Amerika Latin dan Afrika serta beberapa negara Asia: Filipina, Bangladesh, dan Pakistan. Sebaliknya, semakin independen kebijakan serta paradigma pembangunannya, maka semakin mandiri industri dan teknologi. Dengan demikian pembangunan ekonominya akan sukses menyejahterakan rakyatnya. Negara-negara itu antara lain: Jepang dan Korea Selatan sejak awal-awal pembangunannya serta Malaysia, Thailand, China dan India. Pertanyaannya, mengapa Indonesia mengalami keterbelakangan teknologi yang berkelanjutan? Jawabannya tak perlu sepenuhnya mengkaitkannya dengan permasalahan ekonomi semata. Dikembalikan pada amanat konstitusi yang menyangkut kemauan untuk keluar dari “jebakan historis struktural” (*structural historical trap*). Jebakan yang masih menyisakan trauma di dalam tubuh bangsa Indonesia akibat penjajahan yang terlalu lama. Hal ini ditandai adanya perasaan ketidakberdayaan serta keterpesonaan terhadap produk-produk asing dan sangat kurang mendapatkan dorongan massif bagi kemandirian bangsa. Selanjutnya, bila merefleksikannya dengan fenomena kalangan ilmuwan, pakar, teknolog yang jenius dari anak bangsa ini, menunjukkan relatif sangat sedikit menghasilkan karya inventif dan inovatif dalam jumlah cukup untuk dipatenkan dan menjadi produk industri yang laku baik di dalam maupun luar negeri. Di sinilah pentingnya membutuhkan peran proaktif negara. Memang ada satu dua karya penciptaan, misalnya Garbarata dan N-250. Selanjutnya, teknologi *Crack* ciptaan Prof BJ Habibie yang kemudian mendirikan dan memproduksi industri dirgantara yang berada dibawah naungan PT Dirgantara Indonesia (DI).

Dengan relatif sedikit bisa keluar dari jebakan problem historis-struktural yang dicontohkan oleh “gebrakan Habibie”, bersamaan dengan itu muncul pula problem jenis lain. Problem tersebut yakni Proyek Industri Strategis Habibie tersebut, terhadap oleh seretnya pemasaran dan menguatnya penentangan dari kalangan ekonom. Kalangan ekonom menganggap terobosan teknologi tersebut sebagai pemborosan devisa, karena besarnya subsidi APBN. Akibatnya, ketika terjadi krisis moneter 1997/1998, pemerintah dengan klausul IMF tak memberikan lagi subsidi kepada PT DI (dulu, PT IPTN). PT DI kemudian mengalami kemunduran, dan bahkan dapat dikatakan hampir mengalami likuidasi yang

ditandai oleh ratusan tenaga ahlinya *brain drain* bermigrasi ke berbagai perusahaan di mancanegara.

Pada periode Demokrasi Parlementer (tahun 1950-1959) negara Indonesia berdasarkan konstitusi UUD 50. Namun demikian, prinsip-prinsip ekonomi yang terkandung dalam UUD 45 tetap berlaku. Akibat seringkali berganti pemerintahan pada masa itu dan terbatasnya anggaran mengakibatkan tak menunjukkan adanya realisasi serius dalam pembangunan ekonomi dan implementasinya sebagaimana dituntut pasal 27, 33 dan 34 UUD’45. Pada masa itu terdapat “Politik Benteng” yang memberikan lisensi impor kepada pengusaha pribumi untuk menjadi importir besar dengan karakter *Entrepreneur* (Wirausahawan). Namun, akibat korupsi dan penyalahgunaan kebijakan (antara lain fenomena pengusaha “Ali-Baba”), secara umum dinilai kebijakan ekonomi “benteng” kurang berhasil. Terkecuali, munculnya beberapa pengusaha, yakni Sudarpo, Haji Bakrie, Hasyim Ning, TD Pardede, dan Gabungan Koperasi Batik Indonesia (GKBI). Tentu saja, dalam masa awal pasca kemerdekaan ini tidak menunjukkan adanya perkembangan teknologi yang dikuasai oleh bangsa Indonesia. Justru teknologi yang umumnya berkembang dikuasai asing dalam berbagai perusahaannya yaitu pertambangan, pangan, dan kebutuhan rumah tangga.

Pada periode Demokrasi Terpimpin (1959-1965), secara formal pembangunan di Indonesia berdasarkan UUD 45. Namun, dalam prakteknya justru mengalami penyimpangan. Soekarno diangkat sebagai Presiden seumur hidup dan tak mampu merealisasikan program dan kebijakan ekonomi yang serius untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Dengan demikian, Indonesia menurut Higgins (1968) menjadi negara termiskin di dunia. Indonesia juga keluar dari PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) dan bergabung dengan negara blok komunis-China (Poros Jakarta-Beijing), yang berakibat pada hilangnya kesempatan untuk memanfaatkan kerjasama internasional. Dengan kondisi ini Indonesia terkucil dalam komunitas dunia internasional. Saat itu, Soekarno memainkan konflik: ABRI dan kekuatan non-komunis berhadapan dengan komunisme (PKI), melaksanakan politik “Mercuri Suar” dan lainnya yang kemudian mengakhiri pemerintahannya setelah terjadi peristiwa G30S/PKI. Namun harus dicatat, pada masa itu Bung Karno berhasil membangun semangat nasionalisme dan patriotisme yang menggelora secara politik. Sementara secara ekonomi,

mengalami kemunduran, apalagi dalam mengembangkan teknologi dan kewirausahaan. Terkecuali lahirnya wira-usahawan yang dapat dihitung dengan jari sebagai hasil Politik Benteng. Catatan penting yang perlu diketahui bahwa pada tahun 1959, Presiden Soekarno, menasionalisasi perusahaan-perusahaan asing menjadi perusahaan Negara. Namun karena ketidaksiapan dalam manajemennya, perusahaan-perusahaan milik negara tersebut tak mampu menghasilkan kemajuan yang signifikan. Akibatnya tak dapat berkontribusi dalam pembangunan ekonomi yang mampu menyejahterakan rakyat. Saat itu yang lebih memprihatinkan adalah maraknya “*bancakan*” oleh kepentingan-kepentingan non ekonomi, baik dari kalangan oknum militer maupun birokrat. Dampaknya, keberadaan perusahaan-perusahaan negara tersebut tidak mampu menghasilkan perkembangan teknologi dan kewirausahaan oleh anak bangsa.

Pada periode Orde Baru (ORBA) kurun waktu 1965-1988 (Era Pemerintahan Soeharto), pemerintahan dan pembangunan berdasarkan konstitusi-UUD 45. Namun dalam pelaksanaannya, selama 32 tahun memerintah, juga masih relatif kurang mengkongkritkan implementasi UUD 45 khususnya pasal 27 (kesempatan kerja penuh), pasal 33 (pengelolaan sumberdaya alam/SDA bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat) dan pasal 34 (jaminan sosial bagi seluruh penduduk). Dengan kondisi internasional yang ditandai adanya “Perang Dingin”, Soeharto berhasil mendapat bantuan utang serta adanya “*booming* minyak”, yang kemudian digunakan dalam pembangunan ekonomi. Impelementasi pembangunan ekonomi masa Soeharto, berpedoman pada Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN), dan Rencana Pembangunan Lima Tahun (REPELITA). Pelaksanaan pembangunan tersebut berhasil antara lain: *pertama*, menekan kemiskinan absolut dari 56% tahun 1970 menjadi 13% tahun 1998. *Kedua*, pengangguran terbuka rata-rata di bawah 5%. Namun pengangguran keseluruhannya, yakni ditambah pengangguran tersembunyi dan setengah pengangguran menjadi di atas 30%. *Ketiga*, Pertumbuhan ekonomi rata-rata 7%. *Keempat*, inflasi rata-rata sekitar 9%. *Kelima*, tercapai stabilitas politik (karena adanya Golkar sebagai partai politik yang dikendalikan Pak Harto), yang menghasilkan stabilitas ekonomi sehingga terjadi proses industrialisasi dan pembangunan sosial melengkapi pembangunan ekonomi.

Namun dibalik “kisah sukses” tersebut harus dibayar dengan ongkos sosial yang besar yaitu: (1) ketimpangan sangat buruk (200 konglomerat menguasai 76% PDB (PDBI-1996); (2) Sembilan puluh persen uang beredar di Jakarta; (3) Di luar Jawa, pertanian dalam arti luas serta usaha kecil dan menengah (UKM) dan pedesaan mengalami marjinalisasi; (4) Ekologi dan SDA sangat rusak dan dikuasai oleh grup-grup bisnis konglomerasi; dan (5) utang luar negeri US\$ 150 miliar (peringkat ke-3 tertinggi di dunia) — dengan privatisasi dan perdagangan bebas. Akibatnya, pasar uang dan pasar modal mengalami *booming* sehingga terjadilah “*bubble economy*” — perekonomian dengan kuantitas moneter yang sangat besar, tetapi tidak didukung oleh sektor barang dan jasa yang seimbang. Akibatnya, dipicu krisis moneter tahun 1997-1998, Soeharto pun lengser dan era reformasi dimulai.

Namun demikian dalam proses pembangunan ekonomi masa ORBA terdapat hal yang menarik. Walaupun, melibatkan investasi perusahaan multinasional baik dari Jepang maupun negara-negara Barat (Eropa, Amerika Serikat, dan lainnya) ditambah utang luar negeri yang sangat besar, serta adanya “rezeki nomplok minyak bumi” (Petro Dollar). Hal menarik tersebut adalah pengembangan teknologi dan kewirausahaan anak bangsa, khususnya kaum pribumi. *Pertama*, adanya konsep “**Kontrak Karya Bagi Hasil**” dalam bidang minyak bumi dari Direktur Utama Pertamina saat itu, Ibnu Sutowo pada tahun 70-an menunjukkan adanya penguasaan teknologi yang menopangnya oleh anak bangsa. Ibnu Sutowo dengan Pertamina-nya, membina para wirausahawan pribumi sehingga lahir beberapa pengusaha besar seperti Aburizal Bakrie, Muhammad Gobel, dan Iman Taufik.

Kedua, terbitnya Keputusan Presiden (Keppres) yang menjadi momentum untuk menggunakan produksi dalam negeri yang menterinya dijabat Ginandjar Kartasasmita. Momentum ini ditandai dengan munculnya beberapa pengusaha pribumi yang baru seperti Yusuf Kalla, Arifin Panigoro, Fadel Muhammad, dan Pontjo Sutowo. Dalam periode ini memunculkan PT Bukaka Teknik pimpinan Fadel Muhammad berhasil mengembangkan teknologi Belalai Gajah (Garba Rata) yang beroperasi di bandar udara. Karya anak bangsa ini dipatenkan, serta mendapatkan order bukan hanya dari dalam negeri tetapi juga luar negeri.

Ketiga, munculnya peran Prof. Dr. BJ Habibie yang memanfaatkan anggaran negara dan jaringan (*networking*) internasionalnya berhasil mengembangkan pesawat CN-235 dibawah perusahaan PT Nurtanio. Pengembangan teknologi pesawat terbang ini merupakan hasil kerja sama dengan perusahaan penerbangan Spanyol Cassa. Akibat keberhasilan itu, Habibie kemudian mengembangkan perusahaan industri strategis antara lain: (1) PT PAL yang memproduksi Kapal Laut; (2) PT Kereta Api Indonesia (KAI) yang memproduksi Kereta Api; (3) PT Pindad yang memproduksi industri militer. Model pengembangan teknologi yang dikembangkan Habibie ini, juga mendapat kritikan. Kritiknya adalah model ini dianggap memboroskan devisa negara. Kritik itu berasal dari kalangan teknokrat ekonomi. Ketika Indonesia mengalami krisis moneter tahun 1998 kemudian IMF masuk dan berperan dalam penyelamatan ekonomi Indonesia, perusahaan strategis seperti PT Dirgantara Indonesia (DI) dan seluruh industri strategis lainnya yang telah dikembangkan Habibie mengalami kemunduran signifikan. Hal ini disebabkan negara harus mengikuti resep dan rekomendasi IMF untuk mencabut subsidiya tanpa didukung adanya jalan keluar yang strategis. Sampai sekarang PT DI masih beroperasi.

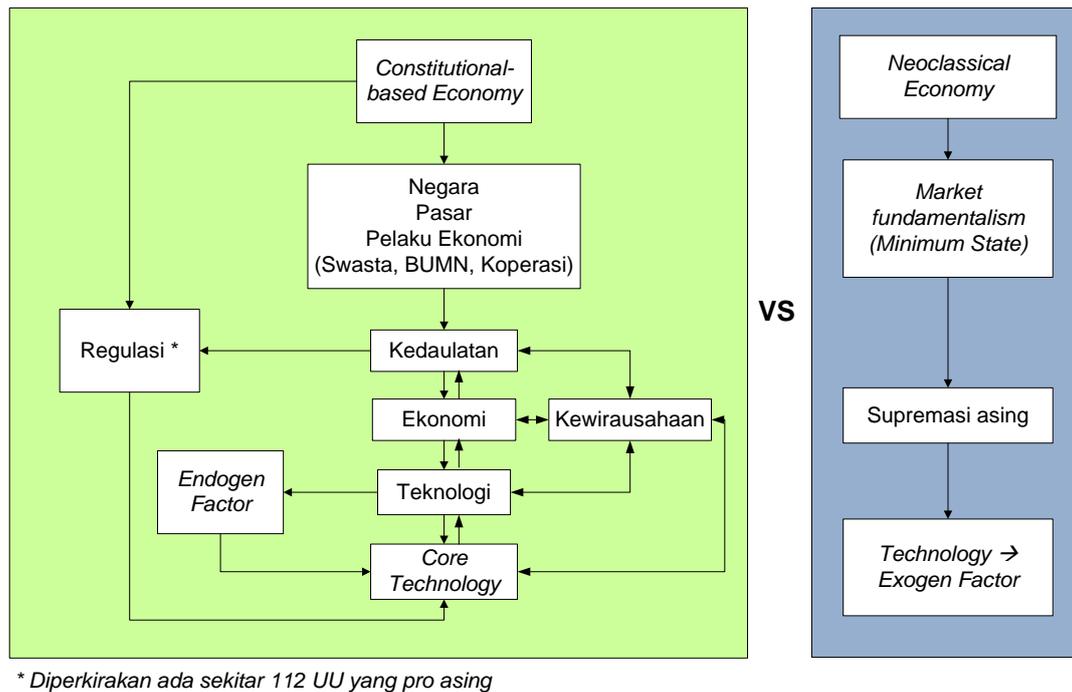
Pada masa Reformasi (era Presiden BJ Habibie, Gus Dur, Megawati hingga SBY), UUD 1945 mengalami amandemen. Hasil amandemen ini bertendensi mengarahkan pembangunan ekonomi nasional semakin liberal. Akibatnya relatif semakin sulit melaksanakan prinsip-prinsip ekonomi berdasarkan UUD 45. Krisis moneter tahun 1998 menyebabkan pertumbuhan ekonomi Indonesia sempat menyentuh angka negatif 13%. Selanjutnya, periode tahun 2001-2007, naik menjadi 2,4-6%. Pada tahun 2008 akibat krisis ekonomi global yang berawal dari AS, pertumbuhan ekonomi Indonesia turun hingga mencapai 4%. Namun, setelah itu pertumbuhan ekonomi Indonesia naik kembali rata-ratanya di atas 6% menempati peringkat tertinggi ketiga di dunia setelah China dan India. Walaupun pada saat yang sama Eropa mengalami krisis ekonomi yang hingga kini belum berakhir. Akibat krisis moneter ini, angka kemiskinan sempat mencapai 26%, tetapi kemudian turun jadi 18% dan 16% dalam periode tahun 2000-2007. Setelah itu angka kemiskinan ini terus menurun hingga 12% pada tahun 2012. Dalam periode waktu yang bersamaan, pengangguran terbuka mencapai 9-11% (bersama pengangguran tersembunyi dan

setengah pengangguran, yang keseluruhannya mencapai lebih dari 40%). Namun, sejak periode 2008-2012 pengangguran terbuka turun menjadi 8-9% (keseluruhan sekitar 38%). Inflasi dan cadangan devisa mencapai "rekor" tertinggi selama pemerintahan reformasi, utamanya masa pemerintahan Presiden SBY. Angka inflasi rata-rata mencapai sekitar 6%, sedangkan cadangan devisa periode 2010-2012 mencapai nilai 110 miliar US\$ dan 120 miliar US\$.

Peran Teknologi pada Masa Orde Baru dan Masa Reformasi

Sejak reformasi teknologi dan IPTEK kurang mendapatkan perhatian yang berarti dalam kebijakan pembangunan nasional. Hal ini dibuktikan dari skala prioritas anggaran dibandingkan masa BJ Habibie menjabat Menteri Negara Riset dan Teknologi maupun kebijakan dan strategi pembangunan ekonomi pada pemerintah pasca-kemerdekaan. Namun secara empiris masyarakat Indonesia menunjukkan sikap yang relatif responsif terhadap teknologi. Utamanya merespon produk teknologi komunikasi, seperti telepon genggam/seluler dan *gadget* lainnya. Gejala ini menunjukkan masyarakat Indonesia terjebak dalam pola kehidupan konsumtif. Masyarakat lebih senang menjadi pemakai/pelanggan telepon genggam atau seluler dan tidak berkeinginan untuk berperan sebagai produsen teknologinya. Data menunjukkan bahwa Indonesia menempati peringkat kelima di dunia—di bawah China, India, Amerika Serikat dan Brasil—sebagai pelanggan seluler yang penggunaanya mencapai 236.800.000.

Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa pada masa pra-penjajahan, Nusantara (baca: Indonesia) malah memiliki catatan gemilang dalam hal perdagangan internasional, termasuk berkembangnya IPTEK serta kewirausahaan yang menopangnya. Sementara masa penjajahan, bangsa Indonesia masuk ke "masa kelim" dalam perekonomian. Hal ini ditandai oleh lapisan masyarakat atas dan menengah dikuasai penjajah dan relatif sedikit pengusaha keturunan Tionghoa dan timur lainnya. Hal serupa juga berlaku dalam perkembangan IPTEK maupun kewirausahaan sebagai penopangnya. Pada masa penjajahan tersebut, bangsa Indonesia mengalami keterbelakangan dengan terciptanya mentalitas *inlanders*—yang mengindap *inferiority complex*—serta terkuburnya perkembangan IPTEK dan kewirausahaan. Pada masa pasca kemerdekaan, meski pemerintahan silih berganti, tetap saja



Gambar 1. Perbandingan Kerangka Berpikir Konstitusi-UUD 45 (*Constitutional-based Economy*) dan Ekonomi Neoklasik (*Neoclassical Economy*).

terjadi sebuah fenomena “sejarah yang tak berubah” (*History of no-Change*). Berbagai kemajuan dalam berbagai aspek (politik, ekonomi, sosial dan budaya), khususnya dalam perekonomian lebih mengutamakan pertumbuhan dan kurang mendapat perhatian dalam penguasaan IPTEK serta pengembangan kewirausahaan sebagai aspek penopangnya. Pesatnya kemajuan IPTEK yang berkembang, lebih condong sebagai konsumen teknologi. Akibat terjadinya keterbelakangan teknologi secara berkelanjutan pasca-kemerdekaan. Konsekuensinya spirit kewirausahaan tidak berkembang— sebagai pencipta berbagai teknologi — baik di kalangan dunia swasta, pemerintahan maupun masyarakat secara keseluruhan.

Penelitian ini menggunakan metode *TFP*. Metode ini bertujuan menganalisis besar-kecilnya peran teknologi dan mengetahui sumber pertumbuhan ekonomi nasional selain peran/sumbangan modal dan tenaga kerja serta faktor residunya yang bersumber dari teknologi dan kewirausahaan. Hasilnya akan menyimpulkan besarnya peran teknologi. Hasil analisis menunjukkan pada negara-negara maju, cenderung menunjukkan bahwa faktor teknologi sangat mendominasi kontribusi pertumbuhan ekonominya, melampaui modal dan tenaga

kerja. Salah satu contohnya adalah Jepang, pertumbuhan ekonominya didorong peran teknologi. Dengan demikian Jepang menjadi salah satu negara industri maju dalam penguasaan teknologi tinggi di dunia.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam periode waktu 1970-2010 data dekomposisi angka pertumbuhan ekonomi Indonesia lebih digerakkan oleh modal dan tenaga kerja yang masing-masing mencapai rata-rata sebesar 2,5% dan 2,9%. Sementara nilai *TFP*-nya hanya mencapai 0,1%. Nilai pertumbuhan *TFP* Indonesia pernah melampaui modal dan tenaga kerja, yaitu periode 1990-1995 yang tertinggi sejak pasca-kemerdekaan. Setelah krisis ekonomi 1998 hingga saat ini periode pertumbuhan *TFP* yang demikian belum pernah terjadi lagi.

Hasil analisis perubahan pemerintahan masa Orde Baru ke masa Reformasi hingga sekarang, menunjukkan bahwa bukan hanya liberalisasi politik yang berlangsung tetapi juga liberalisasi ekonomi. Akibat lanjutannya komitmen pemerintah terhadap kemandirian teknologi, semakin lemah. Terbukti jika membandingkan pertumbuhan ekonomi masa Orde Baru (1974-1996), yang rata-rata 5,97%, ditemukan kontribusi teknologi (dengan perhitungan *TFP*) rata-rata Rp 17 miliar.

Kontribusi *TFP* yang positif tersebut (meski relatif sangat kecil sebesar rata-rata Rp 17 miliar atau 0,002% dari rata-rata PDB) sudah menggambarkan terjadinya efisiensi, yakni pertumbuhan *output* lebih besar dari *input*. Berarti, Indonesia di masa Orde Baru mampu mengelola dan memanfaatkan sumber daya produktif lebih optimal serta menggunakan teknologi maju guna meningkatkan produktivitas. Pertumbuhan *output* tersebut disebabkan dukungan keahlian/ketrampilan, manajemen, teknologi, atau kelembagaan yang relatif efisien dan efektif, baik di sektor manufaktur maupun agro. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas sumberdaya manusia/SDM Indonesia masa sebelum krisis/masa Orba, relatif sudah sedikit lebih maju. Ini terkait dengan adanya independensi dalam perumusan kebijakan masa ORBA dalam perencanaan pembangunan (waktu itu terdapat GBHN yang disusun oleh hampir semua *stakeholder* bangsa). Faktor penjelasnya adalah adanya sifat “Proaktif Negara” dalam proses pembangunan.

Masa Reformasi (1999-2010), dengan pertumbuhan ekonomi rata-rata 4,79% berdasarkan hasil perhitungan penelitian memberikan kontribusi teknologi rata-rata - (minus) Rp 62 miliar. Pertumbuhan *TFP* yang negatif menunjukkan ketidakefisienan dimana pertumbuhan *input* lebih besar dari pertumbuhan *output*. Selain itu menunjukkan Indonesia dalam masa reformasi belum mampu mengelola dan memanfaatkan sumber daya produktif secara optimal serta menggunakan teknologi maju guna meningkatkan produktivitas. Pertumbuhan *output* hanya disebabkan oleh penambahan faktor *input*, bukan akibat keahlian/ketrampilan, manajemen, teknologi, maupun dukungan kelembagaan yang efisien dan efektif. Kesimpulannya: *kapasitas SDM Indonesia masa Reformasi umumnya relatif lebih rendah dalam menguasai teknologi dibandingkan masa Orde Baru.*

Hasil analisis masa Reformasi terkait kontribusi teknologi yang negatif berpengaruh secara massif terhadap kemandirian dan keberdaulatan bangsa. Penyebabnya adalah hilangnya GBHN yang memandu proses pembangunan dan mewujudkan amanat konstitusi yang membutuhkan peran proaktifnya Negara dalam proses pembangunan. Saat ini, meskipun ada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) sebagai dokumen pembangunan, tetapi kurang mewakili seluruh aspirasi komponen bangsa, karena

hanya disusun berdasarkan platform Presiden terpilih yang kemudian disahkan DPR. Ditambah lagi, peran IMF pasca reformasi (sejak tahun 1998), yakni melalui *letter of intent/LoI* IMF yang belakangan namanya berubah menjadi *white paper*. *White paper* ini berpengaruh besar dalam perencanaan dan proses pembangunan di Indonesia karena menjadi acuan pokok Bappenas dalam menyusun perencanaan pembangunan. Kesimpulannya: *perencanaan pembangunan di Indonesia makin tidak independen.*

Hasil riset juga menunjukkan bahwa bersamaan dengan melemahnya kontribusi teknologi yang menggerakkan pertumbuhan ekonomi juga berlangsung proses “de-industrialisasi”. Proses yang mengakibatkan pertumbuhan sektor industri manufaktur (non-migas) mengalami penurunan drastis. Dalam kurun waktu 1987-1996, pertumbuhan sektor industri manufaktur rata-rata sebesar 12% lalu mengalami penurunan tajam rata-rata 5,7% dalam kurun waktu 2000-2008. Kesimpulannya: *telah terjadi kemunduran peran kaum wirausahawan dalam proses pembangunan.*

Daya Saing Indonesia

Guna memperkuat hasil kajian *TFP* perlu didukung analisis persaingan antar-negara, khususnya negara industri maju (NIM) dan negara sedang berkembang (NSB), termasuk Indonesia. Salah satu pembeda NIM dengan NSB adalah tingkat daya saing per-ekonomiannya. Umumnya negara NIM berdaya saing tinggi dibandingkan negara berkembang. Perbedaan daya saing ini berimplikasi pada optimalisasi dan kualitas pencapaian pertumbuhan. Negara-negara yang berdaya saing tinggi umumnya mampu menyerap dana investasi lebih besar sehingga menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang lebih berkualitas. Sebagai ilustrasi, Singapura menduduki peringkat atas dalam berbagai survei ekonomi karena memiliki daya saing tinggi, padahal tidak memiliki SDA. Berbeda dengan Indonesia yang memiliki potensi SDA melimpah tetapi berada di peringkat bawah dalam berbagai survei daya saing. Lazimnya sudah menjadi hukum besi dalam perekonomian bahwa faktor kelimpahan SDA yang sejatinya baru akan berperan sebagai keunggulan komparatif, jika didukung kapasitas teknologi dan lapisan kaum wirausahawan yang mengelolanya. Jika sebaliknya, tak akan menjamin tingginya daya saing suatu negara.

Nilai *Global Competitiveness Index/GCI 2013-2014* yang dipublikasikan *World Economic Forum* menempatkan Indonesia di peringkat (38). Jika dibandingkan dengan negara-negara di kawasan ASEAN, peringkat Indonesia berada di bawah Singapura (2), Malaysia (24), Brunei (28), dan Thailand (37). Posisi Indonesia hanya lebih baik dari Vietnam (70), Filipina (59), dan Kamboja (88). Indonesia juga unggul dibandingkan negara-negara BRIC. Sementara tiga tahun terakhir, peringkat daya saing Indonesia menurun. Selama 5 (lima) tahun terakhir, Indonesia hanya berada di atas Filipina, Vietnam, Kamboja dan Timor Leste. Dalam membaca peringkat daya saing global harus berhati-hati karena terdapat pilar dengan skor berbeda-beda yang berfluktuasi dari tahun ke tahun. Kemajuan tertinggi Indonesia dalam 10 dari 12 pilar indeks adalah infrastruktur dari 17 ke 61. Kualitas lembaga negara dan swasta juga membaik (peringkat ke 67, naik 5) dari seluruh indikator dalam kategori ini. Namun, dua titik gelap dalam pilar ini menyangkut suap (peringkat 106) dan keamanan (peringkat 104) (WEF, 2013).

Teknologi Dan Kewirausahaan Dalam Persepektif Sejarah Dan Kebudayaan

Dalam perspektif sejarah memahami keterbelakangan teknologi dan kemunduran kewirausahaan membutuhkan pemahaman berdasarkan kurun waktu dari masa ke masa, menyangkut kemajuan ekonomi dan perkembangan teknologi. *Pertama*, masa pra-penjajahan dengan kemajuan perekonomian dan teknologi serta kewirausahaan yang menopangnya. Sejarawan Adrian B Lopian (2008) memberikan gambaran ringkas: “*Berabad-abad lamanya kerajaan-kerajaan kecil yang terpecah letaknya di pulau-pulau Indonesia, secara ekonomi, kultural, dan sewaktu-waktu secara politis telah bergabung atau digabungkan dalam satuan-satuan yang lebih besar. Adanya komunikasi dan lalu lintas antarkepulau Indonesia ini sudah barang tentu dimungkinkan oleh penduduknya yang telah mengembangkan suatu jaringan hubungan maritim yang lebih baik, didukung oleh kemajuan teknologi kapal, keahlian navigasi dan suatu “enterprising spirit” yang besar*”.

Kemajuan ekonomi, budaya dan politik yang digambarkan di atas, bermula pada masa Kerajaan Sriwijaya, kemudian dikembangkan oleh kerajaan-kerajaan Hindu (hingga pun-

caknya Kerajaan Majapahit). Selanjutnya, lebih berkembang lagi pada masa kesultanan-kesultanan Islam. Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit telah memajukan Nusantara dengan perdagangan antar pulau dan internasional (mulai Asia Tenggara dan Timur, hingga ke Gujarat dan negara-negara Arab). Kemajuan itu menghasilkan ketinggian budaya istana dan agama (antara lain dengan pendirian candi-candi). Sementara, masa kerajaan Islam, perdagangan berkembang antar pulau, internasional hingga ke Eropa, Asia Tenggara dan Timur serta negara-negara Arab. Hasilnya ekonomi Nusantara berkembang pesat, yang ditopang jiwa *outward looking (internasionalisme)*, kewirausahaan serta pemerintahan yang egaliter (tidak hirarkis). Hal itu, selain berasal dari ajaran agamanya yang menganggap semua orang sama di mata Tuhan. Hal ini juga merefleksikan hilangnya sistem kasta dan feodalisme yang bersumber dari ajaran agama sebelumnya yakni Budha dan Hindu serta berbaginya kekuasaan Sultan dengan Syahbandar (untuk urusan perdagangan internasional) (Damanhuri, 1996).

Pada masa pra-penjajahan telah berkembang teknologi perkapalan dan usaha pertukangan, teknologi budidaya pertanian dan manufaktur untuk memproduksi barang-barang kebutuhan desa-desa dan kalangan priyayi serta kaum bangsawan. Produsen pribumi Indonesia waktu itu telah mampu membuat teknologi tenun katun. Professor Jochen Ropke (1982), ahli ekonomi kerakyatan dari Universitas Phillipps, Marburg Jerman Barat, menyatakan bahwa teknologi tekstil Indonesia berpengaruh terhadap perkembangan industri-industri di Eropa. Sementara, sejarawan Erick Voigt (1931) berpendapat sebagaimana diacu Ropke (1982) menyatakan bahwa teknologi cetak katun Indonesia yang melalui Belanda (khususnya Amsterdam) telah merangsang timbulnya industri baru di Elberfeld, Glarus dan Appenzell, serta terus menyebar di kota-kota Eropa lainnya.

Kedua, masa penjajahan Belanda, yang mengalami kelamnya perekonomian kaum bumiputra menyebabkan terjadinya keterbelakangan teknologi dan kewirausahaan. Masa penjajahan Belanda di mulai dengan datangnya VOC (*Verenigde Oost-Indische Compagnie*) yang merupakan Perseroan Terbatas (PT) dari Belanda di bawah pimpinan Cournelis de Houtman dan De Keyser. Mereka mengirim kapal-kapalnya ke Indonesia dengan misi mencari rempah-rempah awal tahun 1595.

Dengan kekuasaan besar yang diberikan Kerajaan Belanda, VOC memonopoli perdagangan di Indonesia. VOC mengadakan perjanjian-perjanjian dagang tunggal dengan kerajaan-kerajaan di berbagai daerah di Indonesia sambil menjadikan dirinya sebagai pembeli dan penjual tunggal yang mengendalikan harga (Weeselink and Kyff, 1953 dalam Ropke, 1982). Hasilnya VOC meraup keuntungan besar serta mengendalikan kekuasaan politik di Indonesia. VOC bukan hanya sebagai Firma Perdagangan, tetapi juga berperan layaknya sebuah pemerintahan yang dilengkapi kapal-kapal perang dan persenjataan guna menghadapi setiap musuh pesaingnya maupun perlawanan dari penentangnya di Indonesia.

Dengan kekuasaan dan kekuatan militer besar yang miliknya, VOC berhasil mengalahkan kerajaan Islam Pesisir dan menguasai seluruh Nusantara setelah berperang selama hampir 3 abad (awal abad 17-19). Hal ini dikarenakan adanya kerjasamanya dengan kesultanan Mataram yang bersifat agraris-pedalaman dan tertinggal secara ekonomi dibandingkan Islam-pesisir yang lebih berorientasi perdagangan dan menentang VOC. Akibatnya, sejak saat itu, orientasi penduduk Nusantara yang *outward looking, entrepreneurship*, perdagangan, maritim dan egaliter berubah menjadi *inward looking, status oriented*, agraris, hirarkis dan feodal (Damanhuri, 1996).

Roepke (1982) menyatakan bahwa penyebab terkuburnya perkembangan inovasi dan IPTEK di Indonesia pada masa penjajahan Belanda, *pertama*, adanya impor semua barang jadi (manufaktur) dari Eropa sehingga mematikan awal usaha kaum pribumi Nusantara sejak tahun 1740. Dengan kata lain proses industrialisasi di Indonesia yang berada di awal perkembangannya berhenti. Hal itu disebabkan produsen pribumi tidak mampu menyaingi produk-produk Eropa yang diproduksi dengan mesin dan meniru metode produksinya yang modern.

Kedua, hambatan yang tinggi akibat sistem distribusi yang dikelola non pribumi (pengusaha keturunan Tionghoa) serta memiliki kesanggupan wirausaha. Dalam taraf kebebasan berusahanya mereka jauh lebih tinggi dibandingkan pengusaha pribumi yang potensial. Faktor lainnya mempersulit yakni: adanya monopoli pasar oleh pihak kolonial Belanda. Pemerintah kolonial Belanda me-

nerapkan sistem “Kekuasaan Penjajahan tidak langsung” dalam ekonomi maupun politik. Penerapannya melalui kaum feodalis lokal dan menyingkirkan saingan kapitalis asing lainnya di wilayah Nusantara seperti Portugis, Prancis, dan Inggris (Ropke, 1982).

Sejak itulah, sejarah Nusantara mengalami “perekonomi yang kalam” dengan segala dampak keterbelakangan sosial, budaya dan politiknya. Akibat selanjutnya, perkembangan IPTEK hal mana sebelum penjajahan yang relatif mengalami maju semakin terkubur (Lapian, 2008). Perkembangannya politik dalam Pemerintahan Kerajaan Belanda yaitu beralihnya partai yang berkuasa dalam Pemerintahan Belanda) yang berlangsung dari tahun 1700 sampai berakhirnya pemerintahan jajahannya tahun 1945 mempengaruhi posisi VOC di Indonesia. Pemerintah kolonial di Indonesia beralih dari VOC ke Pemerintahan Liberal, lalu Sosialis yang berdampak pada bervariasinya modus-modus eksploitasi tanah jajahan di Nusantara. Hal ini mengakibatkan proses pemiskinan dan keterbelakangan penduduk di satu pihak. Sementara di pihak lain memosisikan Belanda yang sebelum abad 17 sebagai salah satu Negara termiskin di di Eropa berubah menjadi negara terkaya sejak abad 18. Salah satu penyebabnya adalah keuntungan *supernormal* dari hasil eksploitasi (pengerukan) sumberdaya alam yang terus-menerus selama tiga setengah abad berupa rempah-rempah, pertanian, berbagai komoditas perkebunan dan pertambangan yang diperdagangkan di wilayah Nusantara maupun diekspor ke berbagai negara (Mackie, 1963).

Ketiga, masa pasca-kemerdekaan di Indonesia mengalami tahapan di awal kemerdekaan kinerja ekonomi terbengkalai. Semasa ORBA pertumbuhan pertumbuhan ekonomi angkanya fantastik tetapi keterbelakangan teknologi hingga kemunduran kewirausahaan bersifat konstan. Hal ini dapat dianalisis dari gambaran perkembangan ekonomi dalam beberapa periode pemerintahan, yakni pemerintahan tahun 1950-59 (Demokrasi Parlementer), 1959-65 (Demokrasi Terpimpin), 1966-1998 (Orde Baru) dan 1998-sekarang (Masa Reformasi). Walaupun pemerintah jatuh-bangun dan mengalami pergantian pada masa Demokrasi Parlementer, namun Program Politik Benteng —dengan segala kekurangannya— terutama terkait peran Negara adalah tipe ideal bagi penguasaan teknologi dan pengembangan kewirausahaan di Indonesia. Sementara dalam

masa Demokrasi Terpimpin dengan Perang Dingin dan konflik politik yang terus menerus berlangsung di dalamnya, membuat tidak berkembangnya teknologi dan kewirausahaan. Kemudian, dalam masa Orde Baru—dengan sistem politiknya yang tidak menunjang—memunculkan kesadaran untuk meningkatkan peran kaum wirausahawan—meskipun terkesan masih bersifat patronase. Masa reformasi berbeda dengan Orde Baru karena penguasaan teknologi dan *social engineering* untuk melahirkan kaum wirausahawan tidak terfokus dalam kebijakan Negara.

SIMPULAN

Dalam perspektif historis yang *continuum* dalam jangka panjang, semenjak masih disebut Nusantara, masa keemasan Sriwijaya, Majapahit hingga Kesultanan Islam, telah mengalami kemajuan ekonomi yang didukung penguasaan teknologi dan jiwa kewirausahaan. Bedanya dengan saat ini kemajuan ekonomi mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi tetapi tidak mendapatkan dukungan penguasaan teknologi sehingga tidak mencerminkan kesejahteraan mayoritas rakyat. Akibatnya memberi kesan mengingkari fakta sejarah.

Proklamasi kemerdekaan tahun 1945 telah mengalami pergantian rezim pemerintahan. Kenyataannya belum menjalankan amanat konstitusi, yakni mencapai kesejahteraan rakyat. Akibatnya sampai sekarang Indonesia masih mengalami keterbelakangan penguasaan teknologi.

Model pembangunan yang berkembang secara sistematis dan terencana sejak tahun 1970an hingga sekarang, lebih menekankan investasi langsung perusahaan multinasional. Model ini juga ditopang utang luar negeri (bilateral maupun multilateral) tanpa mengembangkan dan menguasai teknologi yang didukung oleh jiwa kewirausahaan. Hal ini terjadi akibat tidak adanya *setting by design* terkait kedua hal itu sehingga berimplikasi pada hilangnya perspektif kemandirian dan kedaulatan dalam pembangunan. Dampak berikutnya bangsa Indonesia memang mengalami pertumbuhan dalam perspektif makro di satu sisi. Namun di sisi lain menjadi konsumen teknologi, barang dan jasa impor.

Hal yang penting dari temuan penelitian adalah hilangnya perspektif konstitusi dalam pembangunan ekonomi sebagai prasyarat mencapai kedaulatan dan memosisikan peran

Negara yang proaktif serta kredibel didukung mekanisme pasar yang sehat dan pelaku ekonomi (swasta, BUMN dan koperasi) yang efisien dan efektif. Prasyarat itulah yang diperlukan untuk mentransformasikan dan memosisikan teknologi dan kewirausahaan sebagai konsideran pembangunan. Tujuannya agar menguasai *core technology* dari berbagai bidang sehingga mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Di masa reformasi prasyarat ini terabaikan sehingga pembangunan ekonomi sangat menekankan mekanisme pasar secara fundamental (neoklasik) dan meminimalisasi peran Negara. Hal ini mengakibatkan penguasaan asing di berbagai bidang sektor yang menimbulkan keterbelakangan teknologi secara berkelanjutan.

Dengan menguatkan pendekatan ekonomi konstitusi diharapkan di dalamnya berkembang ekonomi lokal yang melahirkan lapisan wirausahaan daerah yang didukung kecerdasan dan kearifan lokalnya. Untuk mencapai hal itu membutuhkan dukungan politik, kemandirian teknologi dan jiwa kewirausahaan.

Saran-Saran

Hasil penelitian ini menyarankan: perlunya menegakkan prinsip konstitusi-UUD 45 terkait pro-aktifnya Negara (baca, bukan interventionist) dalam pembangunan, bersamaan dengan mekanisme pasar yang efisien dan efektif, disertai kebijakan ekonomi yang independen berdasarkan kebutuhan rakyat dan bangsa. Bukan semata pendiktean pasar internasional dan negara asing, yang mengabaikan kepentingan rakyat dan bangsa. Dengan demikian akan menciptakan pertumbuhan yang berkualitas dan berkelanjutan serta pembangunan yang berkeadilan sosial berujung pada kemandirian bangsa.

Dalam perspektif kebudayaan perlu memobilisasi gerakan kesadaran dengan program aksi pentingnya yaitu membangun spirit kemandirian (ekonomi, finansial dan teknologi yang ditopang wirausahawan). Gerakan ini harus mendapatkan dukungan pemangku kepentingan nasional, mulai dari pemuka agama, budayawan, seniman, kaum intelektual, akademisi, LSM, hingga aktivis parpol. Gerakan ini diharapkan dapat mencapai kemakmuran, kesejahteraan, keadilan sosial dan kesatuan rakyat sebagai bangsa yang unggul di dunia.

Pemerintah hendaknya memiliki agenda jangka panjang yang tidak tergantung hasil pemilu. Agenda ini disusun para pemikir bangsa lintas-politik menyangkut cetak-biru (*blue*

print), Rancangan Besar, Peta Jalan beserta prioritasnya menuju: “Kemandirian Ekonomi, Finansial dan Teknologi dalam konteks interpededensi global”. Agenda besarnya yaitu sebuah konstruksi ekonomi, finansial dan teknologi bangsa yang berupa hasil sintesis antara seluruh kekuatan elemen kearifan dan kecerdasan lokal se-Nusantara dengan kemampuan mengadopsi wirausahawan nasional dan lokal terhadap puncak-puncak kemajuan dunia. Otonomi Daerah yang menjadi bagian konstruksi demokrasi di Indonesia harus mendukung kemandirian ekonomi, finansial dan teknologi serta lapisan wirausahawan yang tangguh dalam menghadapi tantangan nasional dan global.

Pemerintah dan masyarakat hendaknya melakukan gerakan “revitalisasi teknologi lokal” yang terintegrasi dengan hasil adopsi kemajuan teknologi terbaik dunia dalam bidang pertanian, maritim dan perikanan. Sementara bidang yang kontemporer (Cabang manufaktur seperti otomotif, elektronik, telekomunikasi, informatika, penerbangan, kapal laut, kereta api, dan bioteknologi, material), harus disusun dan dilaksanakan melalui strategi tepat. Gerakan ini berupa generasi baru dari “*Reverse Engineering*” model Jepang, Korea-Selatan, Taiwan dan China” lebih dahulu sukses memulai pengembangan teknologi hilir. Selain itu, pemerintah hendaknya menghidupkan kembali pekerjaan rintisan Prof. Dr. BJ Habibie yang mengembangkan **Delapan Wahana Industri Strategis** dengan adaptasi yang lebih “*demand driven*”. Untuk mewujudkannya perlu mendapatkan dukungan kebijakan fiskal, moneter, pasar modal, *international market intelligent*, dana riset dan pengembangan (R&D) serta kerjasama sistemik Pemerintah-Dunia Riset-BUMN/Swasta.

Menggali potensi “Kenegarawanan dalam Kepemimpinan Penggerak” yang berasal dari kecerdasan dan kearifan budaya lokal di wilayah Nusantara maupun pusat-pusat kemajuan institusi modern (kampus, dunia riset, pesantren, dan seminari). Hal ini akan memotivasi rakyat untuk mencapai pembangunan yang berkeadilan dalam kemakmuran dan berkemakmuran dalam keadilan. Selain itu akan menciptakan lingkungan politik yang *low cost* dan bebas dari politik uang. Nantinya akan mendorong pembangunan yang bervisi jangka panjang melalui kemandirian ekonomi, finansial dan teknologi.

Membangun sistem pendidikan yang memproduksi IPTEK secara masal dengan beragam inovasi, invensi dan paten, serta menjadi produk industri komersial, baik di pasar dalam negeri maupun internasional. Di satu pihak, sistem pendidikan demikian akan merevitalisasi kecerdasan dan kearifan nilai lokal. Sementara dipihak lain akan mampu mengadopsi perkembangan kemajuan pusat-pusat keunggulan dunia, dan berkolaborasi dalam sistem *Triple Helix* (antara pemerintah, dunia industri, dan dunia riset). Pengembangan IPTEK dalam sistem pendidikan ini mensyaratkan kombinasi karakter yang memiliki disiplin pribadi, komitmen kebangsaan, dan integritas moral.

Perlunya membenahi beragam masalah teknis berupa infrastruktur yang terdiri dari (i) fisik: jalan, jembatan, pelabuhan laut dan udara; (ii) sosial: fasilitas pendidikan, kesehatan, jaminan sosial; (iii) ekonomi: zona ekonomi khusus, pasar modal, pasar uang, perbankan, pembiayaan; (iv) hukum: undang-undang, regulasi, peraturan daerah, dan birokrasi serta tenaga trampil di segala bidang. Tenaga trampil ini dihasilkan melalui *Man-Power Planning* berdasarkan *assessment* pasar nasional maupun internasional (sesuai kebutuhan pasar tenaga kerja dari pertumbuhan industri).

Dalam mencapai kemandirian bangsa dalam bidang ekonomi, finansial dan teknologi yang didukung wirausahawan hendaknya dipimpin langsung dan menjadi tanggung jawab “Presiden” sebagai Kepala Negara dan Pemerintahan. Secara kelembagaan harian, di masa datang perlu mempertimbangkan membentuk “**Kementerian Riset, Pendidikan Tinggi dan Pengembangan Industri**” dalam kabinet yang berperan sebagai *vocal point* secara kontinyu untuk mengimplementasikan kebijakan kemandirian teknologi dan industri.

Secara obyektif-ilmiah penelitian ini baru menggambarkan hasil diagnosis makro struktural. Oleh karenanya diperlukan penelitian lanjutan yang menfokuskan pada subyek yang bersifat mezo-institusional. Substansinya yakni mengkaji lebih mendalam potret dinamika institusional beragam kementerian dan lembaga yang menangani pengembangan teknologi. Lembaga tersebut terdiri dari kementerian/ lembaga yaitu riset dan teknologi, pendidikan dan kebudayaan, perindustrian, pertanian, kelautan dan perikanan, BPPT, LIPI, Perguruan Tinggi, Hukum dan HAM, Bappenas, Komite Ekonomi Nasional (KEN), hingga Komite

Inovasi Nasional (KIN). Hal yang bersifat spesifik yaitu mengkaji keberadaan organisasi besar IPTEK yang berjumlah 18 badan riset kementerian; 7 lembaga riset non-kementerian yang bertanggungjawab langsung kepada Presiden; misal Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) serta lembaga riset dan pengembangan (*Research & Development*) yang dimiliki perusahaan swasta, dan; lembaga riset lain yang berkerjasama dengan asing. Hasil penelitian lanjutan ini diharapkan dapat menjelaskan akar masalah mengapa Indonesia mengalami keterbelakangan teknologi dan bagaimana rekomendasi jalan keluarnya. Selanjutnya dapat juga menjelaskan situasi mikro-interaktif yakni mengkaji dinamika dunia riset dan dunia usaha, serta wirausahawan yang didalamnya menganalisis hambatan dan peluang dalam pengembangan kemandirian teknologi.

DAFTAR ACUAN

- Damanhuri DS. 1996. Ekonomi Politik Alternatif, Agenda Reformasi abad 21. Jakarta: Sinar Harapan.
- Lapian AB. 2008. Pelayaran dan Perniagaan Nusantara abad ke 16-17. Jakarta: Komunitas Bambu.
- Higgins B. 1968. Economic Development by Benjamin Higgins. Published Norton & Company, Incorporated, W. W.
- Mackie, JAC. 1963. Sedjarah Pembangunan Ekonomi dalam Dunia Modern. Djakarta: PT Pembangunan Pustaka Sardjana.
- Mubyarto. 2001. Amandemen Konstitusi & Pergulatan Pakar Ekonomi. Aditya Media.
- Ropke J. 1982. *Die Unterentwickelte Freiheit, Wirtschaftliche Entwicklung und unternehmerisches Handeln in Indonesien*. Universitat Marburg: Institut fur Kooperation in Entwicklungslandern de Phillipps.
- Stiglitz JE, Amartya S, Fitoussi JP. Mengukur Kesejahteraan. 2011. Mengapa Produk Domestik Bruto bukan tolok ukur yang tepat untuk menilai kemajuan? Mutiara Arumsari, Fitri Bintang Timur (Penerjemah), Marjin Kiri.
- Swasono SE. 2005. Indonesia dan Doktrin Kesejahteraan Sosial, dari Klasikal dan Neoklasikal sampai ke The End of Laissez-Faire. Perkumpulan Prakarsa.
- Voigt E. 1931. *Wirtschaftsgeschichte Neiderlandisch-Indiens*, Leipzig.
- World Economic Forum (WEF), *The Global Competitiveness Report 2011-2012*, Geneva, 2011.
- _____, *The Global Competitiveness Report 2012-2013*, Geneva, 2012
- _____, *The Global Competitiveness Report 2013-2014*, Geneva, 2013

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN
